



**PIDATO MENTERI KEUANGAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TENTANG
JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DPR RI TERHADAP RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN 2025 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
SELASA, 27 AGUSTUS 2024**

Bismillahirrohmanirrohiim,

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

1. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, atas nikmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025, beserta Nota Keuangannya. Pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua Fraksi DPR RI atas pandangan, masukan dan dukungannya terhadap

RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus 2024. Seluruh tanggapan tersebut menjadi bahan masukan yang sangat berharga dalam pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR-RI pada tahap berikutnya.

Hadirin yang kami muliakan,

2. **Arsitektur RAPBN 2025 didesain untuk merespon tantangan perekonomian dan mendukung agenda pembangunan secara maksimal.** RAPBN 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan, dan mendorong pemerataan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka menuju Visi Indonesia Emas 2045.
3. **RAPBN 2025 juga memiliki nilai yang sangat strategis yakni memastikan agar proses transisi berjalan efektif** dengan tetap menjaga APBN yang *sustainable* dan kredibel. **Desain RAPBN 2025 didorong lebih fleksibel** agar mampu menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi ketidakpastian dan sekaligus memberikan fleksibilitas pelaksanaan program unggulan pemerintahan selanjutnya.
4. **Kami menyadari bahwa perekonomian global saat ini masih dibayangi risiko ketidakpastian yang tinggi.** Situasi perekonomian global yang bergerak sangat dinamis di saat pembahasan RAPBN 2025 ini, perlu direspon secara cermat dan tepat. **Untuk itu dibutuhkan dukungan seluruh stakeholder dan Ibu/Bapak Anggota Dewan yang terhormat.**
5. Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek kedepan, pengelolaan fiskal tahun 2025 akan menghadapi tantangan

yang tidak mudah, maka RAPBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan". RAPBN tahun 2025 juga tetap menjadi instrumen yang diandalkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan *shock absorber* untuk melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

6. Selanjutnya perkenankanlah kami memberikan penghargaan terhadap pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI yang disampaikan oleh Bapak Adisatrya Suryo Sulisto **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)**, Bapak Agung Widiantoro **Fraksi Partai Golongan Karya (F-Partai Golkar)**, Ibu Sri Meliyana **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Partai Gerindra)**, Bapak Fauzi H. Amro **Fraksi Partai NasDem (F-Partai Nasdem)**, Ibu Ratna Juwita Sari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**, Ibu Vera Vebyanthy **Fraksi Partai Demokrat (F-Partai Demokrat)**, Ibu Netty Prasetyani **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**, Bapak Ahmad Rizki Sadig **Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**, dan Bapak Muh. Aras **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)**.
7. **Pemerintah mengapresiasi pandangan dan dukungan dari F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai Demokrat, F-PKS, dan F-PAN, terkait target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025 yang semakin baik dan merata.** Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara inklusif agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang terefleksi dari perbaikan sasaran dan indikator pembangunan. **Saat ini, perkembangan**

terakhir realisasi sasaran dan indikator pembangunan tercatat positif, bahkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka telah menurun ke level prapandemi pada Semester I tahun 2024.

8. Terkait asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN tahun 2025, pada prinsipnya **Pemerintah memiliki pandangan yang sama dengan seluruh fraksi agar asumsi pertumbuhan haruslah realistis dan kredibel dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada.**
9. Prospek pertumbuhan ekonomi nasional tidak lepas dari dinamika dan prospek pertumbuhan global. **Tahun 2025 diperkirakan masih menjadi tahun yang berat bagi perekonomian global. Pertumbuhan global 2025 diperkirakan relatif stagnan jika dibandingkan outlook 2024, yakni tumbuh pada level 3,3%.** Berbagai risiko global yang kita hadapi di tahun 2024 seperti kondisi likuiditas yang ketat, fragmentasi geopolitik, dan tren melambatnya ekonomi Tiongkok diperkirakan berlanjut di tahun 2025.
10. **Dari sisi domestik, tingkat konsumsi rumah tangga diperkirakan masih kuat, terutama didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali, meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli dan akselerasi pengentasan kemiskinan. Sementara itu, investasi diharapkan dapat meningkat, khususnya terkait sektor-sektor berbasis perluasan hilirisasi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam *global value chain*, serta upaya menjaga keberlanjutan pembangunan IKN.**

Ibu/Bapak Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan yang kami hormati,

11. **Menanggapi pandangan F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Nasdem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP atas asumsi tingkat inflasi sebesar 2,5% di tahun 2025, Pemerintah melihat bahwa tekanan inflasi global cenderung menurun di tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan oleh proyeksi beberapa lembaga internasional.** Dari sisi domestik, Pemerintah terus berupaya mengendalikan harga pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan, peningkatan produksi, dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga mengantisipasi potensi dari dampak perubahan iklim dan gangguan cuaca terhadap ketersediaan bahan pangan. Sinergi dan kolaborasi yang kuat selama ini telah terbukti mampu menjaga stabilitas harga di dalam negeri.
12. **Menanggapi pandangan dari F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai Demokrat, F-PKS, dan F-PAN, terkait nilai tukar, Pemerintah sangat mengapresiasi pandangan fraksi kepada Pemerintah tentang asumsi nilai tukar sebesar Rp16.100 per USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,1%. Pemerintah mencermati tekanan dan tantangan di pasar keuangan. Banyak negara, termasuk AS, memiliki tingkat utang tinggi yang menciptakan tekanan fiskal. Risiko resesi juga masih melekat pada AS. Konflik geopolitik juga terus berlanjut.**
13. **Selain faktor fundamental, investor sangat sensitif terhadap perkembangan data dan respons kebijakan.** Sedikit *me-recall*, bagaimana kita merasakan kekhawatiran luar biasa 2 bulan lalu. Rupiah menyentuh Rp16.450 per Dolar AS pada 21 Juni dan *yield* SBN tenor 10 tahun di pasar sekunder menyentuh 7,2% pada 14 Juni.

14. **Namun, situasi berbalik dengan begitu cepatnya. Rupiah menguat hingga Rp15.430 pada Senin 26 Agustus 2024, terapresiasi 6,2% dari level tertinggi di Juni lalu.** Demikian juga *yield* SBN di pasar sekunder, membaik ke level 6,6%.
15. **Kondisi ini dipengaruhi pasar yang semakin optimis suku bunga AS akan dipangkas 3 kali dengan total penurunan 100 *bps*, dari sebelumnya hanya 75 *bps*.** Investor kembali memiliki *appetite* untuk berinvestasi di EMs, termasuk Indonesia. **Situasi yang patut kita syukuri, tetapi juga harus berhati-hati karena apresiasi yang terjadi begitu cepat.**
16. Risiko ketidakpastian ke depan masih tinggi, langkah antisipasi dan kewaspadaan terus diperlukan. Oleh karenanya, Pemerintah siap untuk mendiskusikan lebih lanjut, mempertimbangkan berbagai dinamika terkini dalam prospek perekonomian ke depan.
17. **Menanggapi pandangan F-Partai Demokrat, F-Partai NasDem, F-PKB, dan F-PAN terkait asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar USD 82 per barel,** dapat dijelaskan sebagai berikut. Faktor global sangat memengaruhi *supply* dan *demand*. Pelemahan ekonomi dan tensi geopolitik masih dominan memengaruhi harga minyak mentah dunia. Dari sisi *demand* cenderung diwarnai pelemahan. Dari sisi *supply*, OPEC+ ingin tetap menjaga kestabilan harga minyak di tingkat global, melalui pembatasan produksi minyak mentah. Kedua faktor ini yang mendorong asesmen bahwa harga minyak tidak banyak deviasinya dari level saat ini.
18. Pemerintah **sepakat dengan pandangan dari F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Demokrat, F-Partai Gerindra, F-Partai Nasdem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP terkait**

pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara, baik dari Penerimaan Perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan tetap menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif serta keberlanjutan.

19. **Pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio perpajakan.**

Upaya optimalisasi penerimaan perpajakan dilakukan melalui efektivitas implementasi reformasi perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi, pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi dan *joint program*, penegakan hukum, serta harmonisasi kebijakan perpajakan internasional. Keberlanjutan reformasi perpajakan akan menjadi *backbone* kuat bagi pemerintah dalam mencapai target pembangunan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

20. **Upaya optimalisasi PNBP** terus dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan SDA dengan penyempurnaan kebijakan, optimalisasi dividen BUMN melalui perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN, peningkatan inovasi layanan dan perbaikan tata kelola PNBP, optimalisasi pengelolaan BMN, serta peningkatan sinergi antar instansi pemerintah melalui perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

21. Pemerintah **sependapat dengan F-Partai Demokrat, F-Gerindra, F-Nasdem, dan F-PKS** agar APBN digunakan secara optimal untuk **meningkatkan kesejahteraan masyarakat**. Hal ini tercermin dari arah kebijakan belanja negara yang diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga efektif mendukung agenda pembangunan

menuju Indonesia Maju. Sejalan dengan hal tersebut **Kebijakan Belanja Negara dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025** diarahkan **antara lain** untuk (1) Efisiensi pada belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK, (2) Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi, (3) Reformasi subsidi dan perlintsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta (4) Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Ibu/Bapak Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan yang kami hormati,

22. Pemerintah **sependapat dengan pandangan F-PKS dan F-PPP** agar **Pemerintah mampu mendorong dan memperkuat kualitas belanja (*spending better*)** dengan mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sehingga mampu menghasilkan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. **Pemerintah juga memperbaiki pola penyerapan anggaran agar lebih proporsional, dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pendisiplinan dalam melaksanakan rencana program dan melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.**
23. **Sebagai contoh, dalam rangka mewujudkan SDM unggul, dan berdaya saing, anggaran pendidikan sebesar Rp722,6 triliun difokuskan untuk:** (1) Peningkatan akses pada seluruh jenjang khususnya pendidikan anak usia dini (PAUD) dan perguruan tinggi (PT); (2) Pemerataan kualitas dan layanan pendidikan antardaerah; (3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar; (4) Penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja; (5) Peningkatan investasi di bidang

pendidikan antara lain pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan, dan penguatan perguruan tinggi; dan (6) pemberian makan bergizi bagi peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan. **Program-program tersebut diharapkan akan mendorong terwujudnya SDM unggul, sekaligus mendorong UMKM berdaya dan ekonomi daerah semakin bergerak.**

24. **Dalam rangka mendukung transformasi sistem kesehatan, anggaran kesehatan dialokasikan berbasis kinerja sebesar Rp197,8 triliun. Salah satu kebijakan prioritas bidang kesehatan tahun 2025 yaitu upaya percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting*. Saat ini, prevalensi *stunting* mengalami penurunan dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya melaksanakan penajaman intervensi *stunting* berbasis kewilayahan dengan berfokus pada 12 provinsi prioritas khusus, serta penekanan pada aspek pencegahan pada sasaran 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).**
25. **Pemerintah sependapat dengan pandangan F-Partai Demokrat dan F-PKS bahwa program makan bergizi gratis (MBG) yang menyoar ibu hamil/menyusui dan balita diharapkan menjadi kunci peningkatan kecukupan gizi dan nutrisi, sebagai upaya pencegahan *stunting*.**
26. **Komitmen pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang ditunjukkan antara lain dengan penguatan sektor kesehatan untuk menjaga kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas. Sejalan dengan hal tersebut maka pemeriksaan kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit berkualitas di berbagai daerah akan ditingkatkan pada tahun 2025.**

27. **Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pengentasan kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun.** Anggaran perlindungan sosial tahun 2025 diarahkan antara lain untuk: (1) melanjutkan berbagai program perlinsos seperti PKH, Kartu Sembako, dan mendorong penyaluran subsidi tepat sasaran melalui penyempurnaan basis data dengan memanfaatkan data Registrasi Sosial Ekonomi; (2) mendorong sinergi antar program perlinsos; (3) mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan; (4) memperkuat perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi *ageing population* termasuk penyandang disabilitas; dan (5) mendorong skema perlinsos adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis.
28. **Sejalan dengan pandangan dari F-Partai Gerindra dan F-PKS mengenai perlunya penguatan kedaulatan pangan dan pengurangan impor pangan, maka anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun, meningkat 8,9% dibandingkan tahun 2024.** Arah kebijakan anggaran ketahanan pangan yaitu mendorong kemandirian pangan melalui peningkatan produktivitas pangan. Pemerintah akan melakukan perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.
29. **Menanggapi pandangan dari F-Partai Demokrat, F-Partai Nasdem, F-PKB, dan F-PKS Pemerintah sependapat bahwa pembangunan infrastruktur perlu diperkuat dalam mendukung daya saing ekonomi Indonesia serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.** Capaian pembangunan infrastruktur selama periode tahun 2015-2023 diantaranya telah terbangun jalan tol

sepanjang 2.050 km, jalan nasional sepanjang 5.833 km, serta pembangunan bendungan sebanyak 42 unit. **Dalam RAPBN Tahun 2025 anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp400,3 triliun yang diarahkan antara lain untuk:** (1) pembangunan jaringan irigasi dan bendungan; (2) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dan renovasi sekolah; (3) pembangunan rumah sakit berkualitas; (4) pembangunan infrastruktur jaringan jalan, fasilitas pelabuhan dan bandara, serta konektivitas kereta api untuk menunjang hilirisasi; (5) pembangunan jalan daerah yang mendorong pusat pertumbuhan; (6) pelabuhan penunjang distribusi pangan; (7) pemerataan infrastruktur digital dan teknologi; serta (8) penyediaan dan renovasi rumah bersanitasi baik serta (9) menjaga keberlanjutan IKN.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

30. Pemerintah **sependapat dengan pandangan dari F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, dan F-PAN bahwa Transfer ke Daerah (TKD) harus dapat menjadi penopang dan katalisator pertumbuhan ekonomi di daerah serta dapat menyelesaikan permasalahan ketimpangan antardaerah. Untuk mendukung pembangunan di daerah, kebijakan TKD diarahkan pada** (1) peningkatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) peningkatan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah melalui pembiayaan inovatif dan penguatan *local taxing power*; (3) pengembangan sumber ekonomi baru di daerah; serta (4) penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah.

31. **Pemerintah mengapresiasi pandangan F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Nasdem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP yang terus mengingatkan Pemerintah agar mengelola keseimbangan primer dan defisit anggaran dengan baik.** Defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% PDB merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan program prioritas pemerintah saat ini dan memberikan ruang bagi pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang. **Dalam rangka pembiayaan utang, Pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian, mengendalikan rasio utang dalam batas aman, melakukan pendalaman pasar untuk efisiensi *cost of fund*, serta mendorong pengembangan skema pembiayaan lain yang inovatif, kreatif, dan berkesinambungan.**
32. Sejalan dengan pandangan F-PDIP, F-Partai Golkar, F-PAN, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, dan F-PPP, Pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi kepada BUMN/BLU, mendorong pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan *Special Mission Vehicle (SMV)*, serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

33. Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pemandangan Umum DPR RI terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya. Tanggapan atas Pemandangan Umum yang lengkap dan terinci kami sampaikan di dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang telah kami sampaikan saat ini.

34. Kami menyambut baik dukungan anggota Dewan yang terhormat untuk membahas lebih lanjut RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal yang telah disepakati. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Sekian dan terima kasih.

Wallohul muwaffiq ila aqwamith-thoriq

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Jakarta, 27 Agustus 2024

a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan,

ttd

Sri Mulyani Indrawati